

ABSTRAK:

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan salah satu upaya penting dalam mencapai target *Net Zero Emission* di Indonesia. Untuk meningkatkan daya tarik investasi dan akses pembiayaan proyek ketenagalistrikan berbasis EBT, pemerintah mengubah skema kerja sama dalam *Power Purchase Agreement* (PPA) dari *Build, Own, Operate, and Transfer* (BOOT) menjadi *Build, Own, Operate* (BOO). Penelitian ini menganalisis latar belakang perubahan skema tersebut serta dampaknya terhadap pembiayaan dan investasi proyek penyediaan tenaga listrik EBT di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan skema dari BOOT menjadi BOO dilatarbelakangi oleh rendahnya bankability proyek akibat kewajiban pengalihan aset kepada PT PLN (Persero) pada akhir masa kontrak. Penerapan skema BOO memberikan kepastian kepemilikan aset kepada pengembang serta memungkinkan pembagian risiko yang lebih proporsional antara pemerintah, pengembang, dan lembaga pembiayaan, sehingga meningkatkan akses pembiayaan, peluang pendanaan melalui *project financing*, dan daya tarik investasi. Dengan demikian, perubahan skema tersebut mendukung pengembangan proyek penyediaan tenaga listrik energi terbarukan melalui penguatan aspek pembiayaan dan investasi.

Kata Kunci: *Power Purchase Agreement*, BOOT, BOO, Energi Terbarukan